

# BIROKRASI DALAM CENGKERAMAN POLITIK

Antara Kepentingan Elit  
dan Harapan Rakyat



Khikmawanto, dkk.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **BIROKRASI DALAM CENGKERAMAN POLITIK ANTARA KEPENTINGAN ELITE DAN HARAPAN RAKYAT**

**Khikmawanto, Tri Widiastuti, Bella Fadilah, Mega Amelia,  
Alwin Rizki P., Aliya Nabila, An-Nissa Fitriah Arief,  
Azzahra Maulida Fitria, Bagas Alzazair, Bagas Pramono Sakti,  
Bagus Kurniawan, Diana Syahra, Endang Kristianti Gulo,  
Feri Harits, Grace Evlyanis Helena Mihabalo,  
Guntur Agung Wicaksono, Keysha Maulidia, Namira Salsabila,  
Renaldy, Riosaputra Jaya Zebua, Riri Asdianti, Sahrul Riyadi,  
Sari Meylani, Selvi Dianti Sobari, Sri Yuningsih,  
Tri Ayu Wulandari, You Don't Forget Hia, Daru Heri Tricahyono**

Publica Indonesia Utama

2025

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 150 Hlm; 15,5 X 23 cm

**ISBN: 978-634-7120-83-0**

Cetakan Pertama, Juli 2025

**Birokrasi dalam Cengkeraman Politik  
Antara Kepentingan Elite dan Harapan Rakyat**

Penulis : Khikmawanto, Tri Widiastuti, Bella Fadilah, Mega Amelia,  
Alwin Rizki P., Aliya Nabila, An-Nissa Fitriah Arief,  
Azzahra Maulida Fitria, Bagas Alzazair, Bagas Pramono Sakti,  
Bagus Kurniawan, Diana Syahra, Endang Kristianti Gulo,  
Feri Harits, Grace Evlyanis Helena Mihabalo,  
Guntur Agung Wicaksono, Keysha Maulidia, Namira Salsabila,  
Renaldy, Riosaputra Jaya Zebua, Riri Asdianti, Sahrul Riyadi,  
Sari Meylani, Selvi Dianti Sobari, Sri Yuningsih,  
Tri Ayu Wulandari, You Don't Forget Hia, Daru Heri Tricahyono

Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

*All rights reserved*

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul *Birokrasi dalam Cengkeraman Politik: Antara Kepentingan Elite dan Harapan Rakyat* ini dapat diselesaikan dan hadir untuk memberikan kontribusi penting dalam kajian ilmu sosial dan politik di Indonesia.

Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yuppentek Indonesia (UYI), saya menyambut baik kehadiran buku ini yang mengupas secara komprehensif dinamika birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik. Buku ini menyajikan kajian mendalam terkait politisasi birokrasi, praktik intervensi politik elite, serta dampaknya terhadap profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Lebih jauh, buku ini juga menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi birokrasi yang menyeluruh, mulai dari penerapan meritokrasi, penguatan pengawasan, hingga transformasi budaya kerja, agar birokrasi mampu berfungsi sebagai pelayan publik yang profesional dan akuntabel.

Di tengah kompleksitas tantangan birokrasi di Indonesia, mulai dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, hingga resistansi internal dan keterbatasan kapasitas kelembagaan, buku ini hadir sebagai sumber referensi yang baik untuk mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, serta para pengambil kebijakan. Buku ini menegaskan pentingnya komitmen politik yang kuat, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memastikan birokrasi berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* dan demokrasi.

Kami berharap buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan, dan menjadi inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap kemajuan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Semoga buku ini juga dapat mendorong dialog konstruktif dalam upaya membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada penulis dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini membawa manfaat dan kemajuan bagi bangsa dan negara.

Tangerang, 2025  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Yuppentek Indonesia

H. Rachmat Gustiana, SE., SH., Mkn.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul .....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>Media Sosial, Bara Revolusi Pengawasan Publik?.....</b>	<b>1</b>
<i>Oleh: Khikmawanto</i>	
<b>Janji Palsu, Warga Pun #Kaburajadulu: Refleksi Krisis Kepercayaan yang Mengakar .....</b>	<b>8</b>
<i>Oleh: Tri Widiastuti</i>	
<b>Birokrasi dan Politik Mengubur Masa Depan Papua di Balik Otonomi Khusus .....</b>	<b>13</b>
<i>Oleh: Bella Fadilah</i>	
<b>Ketika Birokrasi Sendiri Menjadi Penghambat Governance Indonesia.....</b>	<b>18</b>
<i>Oleh: Mega Amelia</i>	
<b>Netralitas Birokrasi di Tahun Politik: Antara Idealisme dan Realitas Lapangan.....</b>	<b>24</b>
<i>Oleh: Alwin Rizki P.</i>	
<b>Ketergantungan Birokrasi terhadap Kepentingan Politik Elite .</b>	<b>28</b>
<i>Oleh: Aliya Nabila</i>	
<b>Revolusi Digital Birokrasi: Sekadar Ganti Baju atau Transformasi Hakiki Pelayanan? .....</b>	<b>33</b>
<i>Oleh: An-Nissa Fitriah Arief</i>	
<b>Transformasi Pelayanan Publik Birokrasi untuk Rakyat .....</b>	<b>38</b>
<i>Oleh: Azzahra Maulida Fitria</i>	
<b>Evaluasi Kepemimpinan Milenial dalam Politik Indonesia: Antara Harapan dan Realitas .....</b>	<b>44</b>
<i>Oleh: Bagas Alzazair</i>	
<b>Birokrasi Digital: Solusi Transparansi atau Ancaman Baru terhadap Demokrasi?.....</b>	<b>48</b>
<i>Oleh: Bagas Pramono Sakti</i>	

<b>Pasar Gelap Kekuasaan: Bagaimana Jual Beli Jabatan Merusak Meritokrasi dan Layanan Publik .....</b>	<b>54</b>
<i>Oleh: Bagus Kurniawan</i>	
<b>Reformasi Birokrasi atau Pembodohan Politik? Siapa yang Diuntungkan? .....</b>	<b>61</b>
<i>Oleh: Diana Syahra</i>	
<b>Regenerasi Birokrasi Cuma Mimpi? .....</b>	<b>68</b>
<i>Oleh: Endang Kristianti Gulo</i>	
<b>Birokrasi Pemerintahan: Antara Efisiensi dan Ketidakuasan Publik.....</b>	<b>72</b>
<i>Oleh: Feri Harits</i>	
<b>Simfoni Birokrasi dan Politik: Menjaga Profesionalisme di Tengah Tarik-menarik Kepentingan.....</b>	<b>76</b>
<i>Oleh: Grace Evlyanis Helena Mihabalo</i>	
<b>PPPK di Kota Tangerang: Strategi Politik dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Efisiensi Layanan Publik .....</b>	<b>81</b>
<i>Oleh: Guntur Agung Wicaksono</i>	
<b>Reformasi Birokrasi Melalui <i>Smart Governance</i>: Antara Retorika dan Realitas di Kota Tangerang .....</b>	<b>86</b>
<i>Oleh: Keysha Maulidia</i>	
<b>Makan Bergizi Gratis: Antara Janji Politik dan Kapasitas Birokrasi.....</b>	<b>92</b>
<i>Oleh: Namira Salsabila</i>	
<b>Reformasi Birokrasi dalam Pencegahan Korupsi: Menata Ulang Sistem Demi Masa Depan yang Bersih .....</b>	<b>96</b>
<i>Oleh: Renaldy</i>	
<b>Reformasi Birokrasi Responsif dan Akuntabel di Era Modern..</b>	<b>101</b>
<i>Oleh: Riosaputra Jaya Zebua</i>	
<b>Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia: Antara Politik Birokrasi dan Realitas Ekonomi .....</b>	<b>104</b>
<i>Oleh: Riri Asdianti</i>	
<b>Evaluasi Kinerja Birokrasi Indonesia dalam Menghadapi Krisis Nasional .....</b>	<b>112</b>
<i>Oleh: Sahrul Riyadi</i>	
<b>Gaya Kepemimpinan Populis, Realitas atau Pencitraan Belaka???</b>	<b>118</b>
<i>Oleh: Sari Meylani</i>	

<b>Negeri Seribu Stempel: Memahami Kompleksitas Birokrasi Pertanahan .....</b>	124
<i>Oleh: Selvi Dianti Sobari</i>	
<b>Dinamika Birokrasi Pemerintahan dalam Sektor Kesehatan: Tinjauan Politik dan Tata Kelola .....</b>	130
<i>Oleh: Sri Yuningsih</i>	
<b>Politik Desentralisasi antara Demokratisasi dan Tantangan Tata Kelola Daerah .....</b>	136
<i>Oleh: Tri Ayu Wulandari</i>	
<b>Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Pelayanan Publik yang Efektif .....</b>	143
<i>Oleh: You Don't Forget Hia</i>	
<b>Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun: Sebuah Kontroversi yang Perlu Dievaluasi .....</b>	147
<i>Oleh: Daru Heri Tricahyono</i>	



## **MEDIA SOSIAL, BARA REVOLUSI PENGAWASAN PUBLIK?**

**Oleh: Khikmawanto**

Gelombang digitalisasi telah menyapu bersih berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita berinteraksi, mengonsumsi informasi, dan bahkan berjuang untuk keadilan. Di tengah arus deras ini, media sosial telah muncul sebagai arena baru yang dinamis bagi gerakan sosial, mengukir babak baru dalam sejarah aktivisme dan partisipasi publik. Fenomena yang kita kenal sebagai gerakan sosial digital ini bukan sekadar adaptasi teknologi; ia adalah revolusi dalam mobilisasi, komunikasi, dan pengawasan, yang mendefinisikan ulang hubungan antara warga negara, pemerintah, dan penyedia pelayanan publik. Lebih dari sekadar platform berbagi foto atau video, media sosial kini berfungsi sebagai episentrum yang menggerakkan perubahan dan menuntut akuntabilitas, membuktikan bahwa kekuatan kolektif digital bisa sama ampuhnya dengan kekuatan fisik.

Salah satu dampak paling transformatif dari media sosial pada gerakan sosial adalah kemampuannya untuk mengorkestrasi mobilisasi massa dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan bagaimana sebuah isu kecil, yang mungkin terabaikan di media tradisional, bisa tiba-tiba menjadi perhatian nasional, bahkan global, hanya dalam hitungan jam. Ini bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari arsitektur media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara eksponensial melalui fitur *share*, *retweet*, atau *repost*. Kecepatan penyebaran inilah yang membedakan gerakan digital dari gerakan tradisional yang sering kali membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mengumpulkan massa dan menyebarkan pesan. Seperti yang ditegaskan oleh Manuel Castells, seorang sosiolog terkemuka yang banyak meneliti tentang era informasi,

dalam bukunya *Communication Power* (2009), “internet adalah medium baru untuk komunikasi interaktif yang memberdayakan pembentukan komunitas-komunitas yang lebih besar dan lebih kuat.” Kutipan ini sangat relevan; media sosial, sebagai bagian integral dari internet, telah melampaui batasan geografis dan sosiokultural, memungkinkan individu dari latar belakang yang berbeda untuk bersatu di bawah satu payung perjuangan, menciptakan gelombang solidaritas yang meluas dengan dampak yang signifikan.

Kecepatan penyebaran informasi ini menghilangkan hambatan yang dahulu menghalangi aksi kolektif berskala besar. Kita tak lagi membutuhkan pertemuan fisik yang rumit atau jaringan distribusi pamflet yang luas. Sebuah tagar yang tepat, sebuah unggahan video yang menggugah, atau cerita pribadi yang menyentuh hati, bisa dengan cepat menyulut percakapan, membangun kesadaran kolektif, dan mendorong orang untuk bertindak. Ambil contoh kampanye daring yang menyoroti kasus ketidakadilan atau diskriminasi; video amatir yang diunggah seorang warga, yang mungkin hanya menggunakan kamera ponsel, bisa menjadi bukti tak terbantahkan, memicu amarah kolektif, dan pada akhirnya, menekan pihak berwenang untuk mengambil tindakan. Ini adalah bentuk demokratisasi informasi yang radikal, di mana setiap pengguna, tanpa gelar jurnalistik atau afiliasi media besar, berpotensi menjadi “jurnalisme warga” yang meliput dan melaporkan kejadian secara *real-time*, secara efektif menantang monopoli narasi oleh media arus utama. Informasi yang tadinya tersembunyi kini dapat diungkap dan disebarluaskan secara instan, mengubah dinamika kekuatan antara warga dan pemangku kepentingan.

Lebih dari itu, media sosial telah secara fundamental mengubah siapa yang bisa bersuara dan didengar. Ia memfasilitasi demokratisasi suara, di mana hierarki tradisional sering kali kabur. Suara seorang mahasiswa yang menulis cuitan, seorang ibu rumah tangga yang mengunggah keluhan di Facebook, atau seorang pekerja yang membagikan pengalamannya di TikTok, jika pesannya relevan dan mampu memicu empati kolektif, bisa memiliki dampak yang sama besarnya dengan suara seorang tokoh masyarakat atau politikus. Hal ini sejalan dengan pandangan Howard Rheingold, yang dalam bukunya *Smart Mobs: The Next Social Revolution* (2002) mengamati

fenomena “koordinasi tanpa pemimpin formal yang memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir diri secara spontan dan efektif.” Kekuatan muncul dari jaringan dan konektivitas, bukan dari struktur piramida yang kaku atau kepemimpinan tunggal. Kelompok-kelompok marginal yang sebelumnya sulit menyuarakan aspirasinya, yang mungkin terpinggirkan oleh media arus utama atau struktur kekuasaan tradisional, kini menemukan wadah yang inklusif. Mereka dapat berorganisasi, berbagi pengalaman, dan membangun narasi tandingan yang menantang *status quo*, membentuk identitas kolektif dan memperkuat solidaritas. Dalam banyak kasus, tekanan publik yang terakumulasi di media sosial telah menjadi katalisator bagi gerakan demonstrasi fisik di jalanan, pengajuan petisi resmi, atau bahkan perubahan kebijakan yang signifikan dan mendesak. Ini membuktikan bahwa mobilisasi digital bukan hanya sekadar *likes* dan *shares* yang dangkal, melainkan fondasi kokoh bagi aksi nyata yang memiliki resonansi di dunia fisik, mendorong perubahan sosial dan politik yang signifikan.

Namun, kemampuan mobilisasi ini juga tidak luput dari tantangan. Kecepatan penyebaran informasi yang sama juga berlaku untuk disinformasi atau hoaks, yang dapat memecah belah opini publik, merusak reputasi, atau bahkan memicu konflik sosial. Fenomena “*echo chamber*” dan “*filter bubble*”, di mana algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, dapat membatasi paparan terhadap sudut pandang yang berbeda. Hal ini berisiko memperkuat bias dan mengurangi kemampuan untuk memahami kompleksitas suatu isu, yang pada gilirannya dapat menghambat dialog konstruktif dan solusi bersama. Literasi digital dan kemampuan untuk memverifikasi informasi menjadi keterampilan krusial yang harus dimiliki setiap pengguna media sosial, agar mobilisasi dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan efektif. Ini adalah pertarungan besar yang harus dimenangkan dalam setiap gerakan sosial digital.

### **Pengawasan Pelayanan Publik, dari Keluhan Individu Menjadi Audit Kolektif dan Katalis Akuntabilitas**

Peran media sosial tidak berhenti pada mobilisasi dan advokasi; ia juga telah menjadi alat pengawasan yang tak ternilai

harganya, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Dahulu, masyarakat mungkin merasa tidak berdaya ketika menghadapi birokrasi yang lambat, pelayanan yang tidak memuaskan, atau bahkan praktik korupsi. Saluran pengaduan sering kali berbelit-belit, tidak transparan, dan terkesan tidak efektif, membuat warga enggan untuk menyuarkan keluhan mereka karena merasa suara mereka tidak akan didengar. Kini, media sosial menawarkan mekanisme pengawasan yang lebih langsung, transparan, dan berdaya ungkit, memberdayakan masyarakat untuk memegang akuntabilitas para penyedia layanan publik dan pemerintah itu sendiri.

Pertama, media sosial menjadi platform untuk keluhan dan masukan langsung yang tak terelakkan oleh pihak berwenang. Warga dapat mengunggah foto atau video yang menunjukkan kondisi fasilitas umum yang buruk—jalan rusak, sampah menumpuk, atau penerangan jalan yang padam—antrean panjang yang tak manusiawi di kantor pelayanan, atau bahkan perilaku petugas yang tidak etis secara *real-time*. Keluhan-keluhan ini, ketika mendapatkan perhatian publik yang luas dan menjadi viral, sering kali memaksa instansi terkait untuk segera merespons dan bertindak. Tidak jarang kita melihat akun media sosial resmi lembaga pemerintah atau perusahaan publik merespons aduan yang viral dengan cepat, menunjukkan bahwa mereka merasa tertekan oleh sorotan publik digital, dan menyadari dampak reputasi yang signifikan. Tekanan publik yang masif ini sering kali jauh lebih efektif daripada jalur birokrasi formal yang lambat, karena dampaknya langsung terasa pada citra dan kredibilitas lembaga.

Kedua, media sosial memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika sebuah isu pelayanan publik menjadi viral—misalnya, kasus penyelewengan dana bantuan sosial atau lambatnya penanganan bencana—publik akan menuntut penjelasan yang terang benderang dan tindakan konkret, bukan sekadar janji kosong. Tekanan ini memaksa pihak berwenang untuk lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan implementasi program. Masyarakat dapat dengan mudah memantau janji-janji yang diberikan oleh pejabat atau institusi, bahkan menelusuri jejak digital dari pernyataan mereka. Jika janji tersebut tidak ditepati, media sosial akan menjadi tempat untuk

menuntut pertanggungjawaban secara terbuka, sering kali dengan desakan yang tak bisa diabaikan. Ini sejalan dengan pandangan Jan van Dijk, seorang pakar terkemuka di bidang masyarakat jaringan, dalam bukunya *The Network Society* (2010), yang menyatakan bahwa “media sosial memfasilitasi komunikasi vertikal dari warga ke pemerintah dan sebaliknya, serta komunikasi horizontal antarwarga.” Saluran komunikasi dua arah ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pemerintah responsif terhadap kebutuhan warganya. Warga kini memiliki alat untuk secara kolektif mengaudit kinerja pemerintah dan penyedia layanan, beralih dari sekadar penerima layanan menjadi pemegang kendali dan pengawas.

Terakhir, media sosial memungkinkan pertukaran informasi antarwarga mengenai pengalaman pelayanan publik. Masyarakat bisa saling berbagi tip navigasi birokrasi, memberikan peringatan tentang praktik yang tidak benar di suatu lembaga, atau bahkan merekomendasikan layanan yang baik. Ini menciptakan semacam “audit sosial” yang dilakukan oleh warga sendiri, di mana kualitas pelayanan publik dinilai dan dibahas secara terbuka dan kolektif. Data dan cerita yang dikumpulkan secara kolektif ini, meskipun anekdotal, bisa menjadi dasar bagi advokasi perubahan kebijakan atau perbaikan sistem yang lebih terarah dan berbasis bukti lapangan. Misalnya, kampanye #JakartaPunyaCerita di X (sebelumnya Twitter) atau tagar yang menyoroti lambatnya penanganan banjir sering kali berhasil menarik perhatian pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan signifikan. Ini menunjukkan bagaimana akumulasi pengalaman individu di ruang digital dapat membentuk sebuah “intelijen kolektif” yang kuat, mendorong perbaikan sistemis. Dengan demikian, media sosial telah mentransformasi keluhan individu menjadi kekuatan pengawasan kolektif, memastikan bahwa suara publik menjadi penentu dalam peningkatan kualitas pelayanan.

### **Tanggung Jawab dalam Ranah Digital dan Masa Depan Partisipasi Publik**

Meskipun potensi media sosial dalam menggerakkan perubahan dan pengawasan sangat besar, kita juga tak boleh abai terhadap tantangan dan batasannya. Isu penyebaran informasi

palsu atau hoaks, yang dapat merusak kepercayaan dan memecah belah komunitas, adalah bahaya laten yang harus terus diwaspadai. Fenomena *echo chamber* yang membatasi pandangan dan *filter bubble* yang mengisolasi kita dari perspektif berbeda, dapat menghambat dialog konstruktif yang diperlukan untuk solusi kompleks. Selain itu, risiko *slacktivism*—partisipasi daring yang tidak diterjemahkan menjadi aksi nyata—juga menjadi kritik terhadap gerakan sosial digital, meskipun sering kali *engagement* awal di dunia maya adalah pemicu penting bagi tindakan di dunia nyata.

Terlebih lagi, masalah privasi dan keamanan data dalam konteks aktivisme digital menjadi perhatian serius, terutama di negara-negara dengan kontrol pemerintah yang ketat. Data pribadi yang dibagikan di media sosial, bahkan untuk tujuan mulia, bisa menjadi target bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk peretasan atau pengawasan oleh negara. Aktivis digital perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko-risiko ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan komunitas mereka. Edukasi tentang keamanan siber dan anonimitas menjadi makin relevan dalam lanskap digital ini.

Pada akhirnya, gerakan sosial digital bukanlah sekadar tren sesaat; ia adalah manifestasi dari transformasi mendalam dalam cara masyarakat berinteraksi dengan kekuasaan. Media sosial telah membongkar dinding-dinding birokrasi yang tinggi, memberikan suara kepada yang sebelumnya tidak terdengar dan terpinggirkan, serta memperkuat posisi warga sebagai pengawas dan penggerak perubahan. Ini adalah janji demokrasi yang lebih partisipatif dan akuntabel, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang atau statusnya, memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik. Namun, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab besar untuk kritis dalam menyaring informasi, memverifikasi fakta sebelum menyebarkan, serta memastikan bahwa gema digital kita diterjemahkan menjadi dampak nyata yang positif bagi pelayanan publik dan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana kita akan memanfaatkan kekuatan ini secara bijak dan etis di masa depan? Ini adalah pertanyaan fundamental yang harus terus kita renungkan dan jawab bersama, untuk memastikan bahwa teknologi menjadi alat pembebasan, bukan belenggu baru.

**Daftar Pustaka**

- Castells, Manuel. (2009). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Rheingold, Howard. (2002). *Smart Mobs: The Next Social Revolution*. New York: Perseus Publishing.
- van Dijk, Jan A.G.M. (2010). *The Network Society: Social Aspects of New Media* (3rd ed.). California: Sage Publications.

## **JANJI PALSU, WARGA PUN #KABURAJADULU: REFLEKSI KRISIS KEPERCAYAAN YANG MENGAKAR**

**Oleh: Tri Widiastuti**

Di balik gemuruh retorika kampanye dan semarak janji politik yang menggelegar, kita kerap menyaksikan fenomena yang kian mengkhawatirkan: krisis kepercayaan. Frasa #KaburAjaDulu yang viral di media sosial bukan lagi sekadar guyonan satire, melainkan sebuah epitaf pahit atas hilangnya keyakinan publik terhadap integritas dan kompetensi pemerintahan. Tulisan ini akan menyelami akar masalah krisis kepercayaan, menganalisis dampak multidimensionalnya, dan mengurai bagaimana janji palsu telah menjadi racun sistemis yang menggerogoti fondasi demokrasi.

### **Janji sebagai Kontrak yang Dilanggar: Dimensi Psikologis dan Sosiologis**

Akar permasalahan krisis kepercayaan terletak pada inkonsistensi fundamental antara janji dan realisasi. Politik modern, tak terkecuali di Indonesia, telah terjerembap dalam siklus yang seolah tak berujung: para kandidat menggembar-gemborkan program-program ambisius, memoles citra diri dengan narasi perubahan yang memukau, dan secara implisit membangun ekspektasi tinggi di benak pemilih. Janji-janji kesejahteraan ekonomi, pemberantasan korupsi, perbaikan infrastruktur, meningkatkan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas layanan publik menjadi magnet elektoral. Namun, setelah palu kekuasaan diketok, janji-janji tersebut sering kali menguap ditelan pusaran birokrasi yang lamban, kepentingan pribadi yang mengemuka, atau bahkan disengaja untuk tidak dipenuhi karena kalkulasi politik yang pragmatis.

Secara psikologis, pelanggaran janji berulang kali memicu apa yang disebut sebagai *learned helplessness* atau ketakberdayaan

yang dipelajari pada level kolektif (Seligman, 1993). Ketika individu dan komunitas secara konstan dihadapkan pada ketidakmampuan mereka untuk mengubah situasi yang merugikan, meskipun sudah berusaha, mereka cenderung mengembangkan sikap apatis dan menyerah. Dalam konteks politik, ini berarti warga yang berulang kali dikecewakan janji politikus akan menarik diri dari partisipasi, merasa bahwa suara mereka tidak berarti dan perubahan adalah ilusi. Sikap “kabur” ini adalah manifestasi dari resignasi kolektif.

Secara sosiologis, janji palsu menghancurkan modal sosial, yaitu jaringan kepercayaan dan norma resiprokal yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh para sosiolog, kepercayaan adalah perekat sosial. Ketika kepercayaan pada institusi negara terkikis, hubungan antarwarga pun dapat terpengaruh, memunculkan kecurigaan umum terhadap otoritas dan bahkan sesama warga. Lingkungan yang sarat ketidakpercayaan ini menjadi lahan subur bagi polarisasi, penyebaran hoaks, dan disintegrasi sosial.

### **Erosi Legitimasi dan Ancaman Demokrasi**

Dampak dari janji palsu ini jauh melampaui kekecewaan personal. Ia secara fundamental mengikis legitimasi pemerintahan, sebuah konsep kunci dalam teori politik yang merujuk pada hak moral pemerintah untuk memerintah dan mendapatkan kepatuhan dari rakyat. Ketika legitimasi terkikis, tatanan demokrasi menjadi rapuh.

Penurunan partisipasi politik ditandai dengan angka golput yang tinggi atau menurunnya antusiasme dalam pemilu, adalah gejala nyata dari krisis ini. Warga yang merasa dibohongi akan menginternalisasi pesan bahwa demokrasi adalah fatamorgana, sebuah sistem yang hanya melayani kepentingan elite. Ini berbahaya, karena tanpa partisipasi aktif dan pengawasan yang konstan dari publik, pemerintah dapat bergeser ke arah otoritarianisme atau kleptokrasi, di mana kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Lebih lanjut, krisis kepercayaan menciptakan lingkaran setan negatif. Kekecewaan publik yang meluas dapat memicu ketakpedulian terhadap isu-isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mengapa harus peduli jika pada akhirnya tidak ada perubahan? Sikap apatis

ini membuka celah bagi praktik KKN untuk beranak pinak tanpa pengawasan yang memadai. Warga yang merasa tidak didengar atau diwakili akhirnya memilih untuk “kabur” dari tanggung jawab sipil, bersembunyi di balik dinding sikap apatis, dan mencari solusi di luar kerangka resmi, bahkan melalui jalur nonprosedural. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi, karena tanpa pengawasan timbal balik antara rakyat dan penguasa, sistem politik akan kehilangan keseimbangan.

### **Membangun Kembali Pilar Kepercayaan: Jalan Keluar dari #KaburAjaDulu**

Lantas, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan yang mematikan ini? Kunci utamanya adalah pemulihan integritas dan akuntabilitas. Ini bukan sekadar retorika, melainkan kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu berani melihat ke dalam. Apa yang membuat warga kehilangan harapan?

Pertama, pemerintah harus memahami bahwa janji adalah utang politik dan moral yang harus dibayar. Ini menuntut komitmen serius terhadap transparansi dalam setiap proses pengambilan kebijakan, keterbukaan informasi publik, dan kesediaan untuk mengakui kesalahan serta mengambil tindakan korektif. Implementasi kebijakan yang berlandaskan data dan bukti, bukan sekadar popularitas, juga krusial.

Kedua, mekanisme pengawasan harus diperkuat secara independen dan partisipatif. Lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ombudsman, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberikan otonomi penuh dan didukung penuh dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik. Lebih dari itu, partisipasi masyarakat sipil harus digalakkan dan difasilitasi. Ini sejalan dengan pemikiran Alexis de Tocqueville tentang pentingnya asosiasi sipil sebagai fondasi demokrasi yang kuat; makin banyak kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam mengawasi dan menyuarakan aspirasi, makin sulit bagi pemerintah untuk menyimpang dari janji-janjinya.

Ketiga, penegakan hukum harus adil dan tanpa pandang bulu. Hukuman tegas bagi para pejabat yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan, melanggar janji publik secara sistematis, atau terlibat